



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / ST.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / SR.140/10/2011 tentang Pupuk An Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 / Permentan / OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompokkani dan Gabungan Kelompokkani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 366);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 / Permentan / SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
29. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.

5. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang(termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan atau tanaman hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
14. Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
17. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
18. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
19. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## BAB III

### PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dan/atau petambak yang telah dan bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
  - a. Petani yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usahatani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan.
  - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan Usulan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor provinsi dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, Bupati/Walikota menetapkan alokasi per Kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai kebutuhan yang prioritas di wilayahnya masing-masing.
- (2) Terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

#### Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota bersama Kelembagaan penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat Petani, Petambak dan/atau di wilayahnya.

### BAB IV

#### REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan :
  - a. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi; dan
  - b. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau realokasi antara realokasi antar Kabupaten/Kota, wajib meniadakanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota, dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

## BAB V

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani dengan ketentuan :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau kelompok tani; dan
  - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Kepala Dinas Provinsi untuk direkap dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



- (7) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, Petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota serta Dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### BAB VI

#### HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
  - e. Pupuk Organik = 40 kg.

## Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

### Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan dan Perdagangan dan Koperasi Provinsi.

## Pasal 14

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 15

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/ Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
2 H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2015  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016  
MENURUT SUB SEKTOR

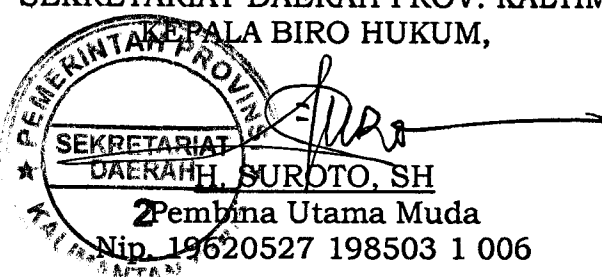
NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)					(TON)
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Tanaman Pangan	14,724.4	4,014.1	2,050.3	25,552.8	1,740.6	
2	Hortikultura	876.0	322.2	124.6	1,552.7	188.3	
3	Perkebunan	2,056.2	901.6	441.5	4,858.1	178.1	
4	Peternakan	166.5	32.2	29.9	232.4	4.9	
5	Perikanan Budidaya	276.9	99.9	3.7	83.9	18.1	
	JUMLAH	18,100.0	5,370.0	2,650.0	32,280.0	2,130.0	

Samarinda, 15 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2015  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016  
MENURUT JENIS DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten/Kota	JENIS PUPUK (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Paser	4,300	925	800	9,000	500
2	Penajam Paser Utara	3,000	850	400	4,500	300
3	Kutai Kartanegara	5,980	1,359	400	7,500	525
4	Kutai Timur	2,500	1,130	430	5,500	70
5	Kutai Barat	150	100	50	600	25
6	Berau	900	245	250	2,600	60
7	Mahakam Hulu	10	9	5	15	-
8	Samarinda	800	372	150	1,500	400
9	Balikpapan	400	350	150	1,000	220
10	Bontang	60	30	15	65	30
	Jumlah	18,100	5,370	2,650	32,280	2,130


Samarinda, 15 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


  
**2 H. SUROTO, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECIERAN TERKINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	UREA	18,100.0	1,696.5	1,340.9	1,583.1	1,659.6	1,687.6	1,367.7	1,110.2	905.0	1,168.8	1,376.6	1,866.1	2,337.7
2.	SP-36	5,370.0	530.4	532.6	549.1	549.0	496.5	352.9	249.9	197.3	321.1	432.9	568.8	589.6
3.	ZA	2,650.0	261.8	262.8	270.9	270.8	245.0	174.1	123.3	97.3	158.5	213.6	280.7	291.0
4.	NPK	32,280.0	3,188.5	3,201.6	3,300.5	3,299.0	2,984.3	2,121.2	1,502.0	1,185.8	1,930.2	2,602.2	3,419.0	3,544.2
5.	ORGANIK	2,130.0	210.4	211.3	217.8	217.7	196.9	140.0	99.1	78.2	127.4	171.7	225.6	233.9
	JUMLAH	60,530.0	5,887.6	5,549.3	5,921.4	5,996.1	5,610.2	4,155.9	3,084.5	2,463.7	3,706.0	4,797.0	6,360.2	6,996.3

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	14,724.4	1,380	1,091	1,288	1,350	1,373	1,113	903	736	951	1,120	1,518	1,902
2.	HORTIKULTURA	876.0	82	65	77	80	82	66	54	44	57	67	90	113
3.	PERKEBUNAN	2,056.2	193	152	180	189	192	155	126	103	133	156	212	266
4.	PETERNAKAN	166.5	16	12	15	15	16	13	10	8	11	13	17	22
5.	PERIKANAN	276.9	26	21	24	25	26	21	17	14	18	21	29	36
	JUMLAH	18,100.0	1,697	1,341	1,583	1,660	1,688	1,368	1,110	905	1,169	1,377	1,866	2,338

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	4,014.1	376	297	351	368	374	303	246	201	259	305	414	518
2.	HORTIKULTURA	322.2	30	24	28	30	30	24	20	16	21	25	33	42
3.	PERKEBUNAN	901.6	85	67	79	83	84	68	55	45	58	69	93	116
4.	PETERNAKAN	32.2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	4
5.	PERIKANAN	99.9	9	7	9	9	9	8	6	5	6	8	10	13
	JUMLAH	5,370.0	503	398	470	492	501	406	329	269	347	408	554	694

JENIS PUPUK : ZA

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	(TON)
1.	TANAMAN PANGAN	2,050.3	192	152	179	188	191	155	126	103	132	156	211	265	
2.	HORTIKULTURA	124.6	12	9	11	11	12	9	8	6	8	9	13	16	
3.	PERKEBUNAN	441.5	41	33	39	40	41	33	27	22	29	34	46	57	
4.	PETERNAKAN	29.9	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2	3	4	
5.	PERIKANAN	3.7	0.35	0.27	0.32	0.34	0.34	0.28	0.23	0.19	0.24	0.28	0.38	0.48	
	JUMLAH	2,650.0	248	196	232	243	247	200	163	133	171	202	273	342	

JENIS PUPUK : NPK

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	(TON)
1.	TANAMAN PANGAN	25,552.9	2,395	1,893	2,235	2,343	2,383	1,931	1,567	1,278	1,650	1,943	2,634	3,300	
2.	HORTIKULTURA	1,552.7	146	115	136	142	145	117	95	78	100	118	160	201	
3.	PERKEBUNAN	4,858.1	455	360	425	445	453	367	298	243	314	369	501	627	
4.	PETERNAKAN	232.4	22	17	20	21	22	18	14	12	15	18	24	30	
5.	PERIKANAN	83.9	8	6	7	8	8	6	5	4	5	6	9	11	
	JUMLAH	32,280.0	3,026	2,391	2,823	2,960	3,010	2,439	1,980	1,614	2,085	2,455	3,328	4,169	

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	(TON)
1.	TANAMAN PANGAN	1,740.6	163	129	152	160	162	132	107	87	112	132	179	225	
2.	HORTIKULTURA	188.3	18	14	16	17	18	14	12	9	12	14	19	24	
3.	PERKEBUNAN	178.1	17	13	16	16	17	13	11	9	12	14	18	23	
4.	PETERNAKAN	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
5.	PERIKANAN	18.1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	
	JUMLAH	2,130.0	200	158	186	195	199	161	131	107	138	162	220	275	

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	4,300	404.2	318.2	378.4	395.6	399.9	326.8	262.3	215.0	275.2	326.8	442.9	554.7
2.	PENAJAM PASER UTARA	3,000	282.0	222.0	264.0	276.0	279.0	228.0	183.0	150.0	192.0	228.0	309.0	387.0
3.	KUTAI KERTANEGARA	5,980	562.1	442.5	526.2	550.2	556.1	454.5	364.8	299.0	382.7	454.5	615.9	771.4
4.	KUTAI TIMUR	2,500	235.0	185.0	220.0	230.0	232.5	190.0	152.5	125.0	160.0	190.0	257.5	322.5
5.	KUTAI BARAT	150	14.1	11.1	13.2	13.8	14.0	11.4	9.2	7.5	9.6	11.4	15.5	19.4
6.	BERAU	900	84.6	66.6	79.2	82.8	83.7	68.4	54.9	45.0	57.6	68.4	92.7	116.1
7.	MAHAKAM HULU	10	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3
8.	SAMARINDA	800	75.2	59.2	70.4	73.6	74.4	60.8	48.8	40.0	51.2	60.8	82.4	103.2
9.	BALIKPAPAN	400	37.6	29.6	35.2	36.8	37.2	30.4	24.4	20.0	25.6	30.4	41.2	51.6
10.	BONTANG	60	5.6	4.4	5.3	5.5	5.6	4.6	3.7	3.0	3.8	4.6	6.2	7.7
	JUMLAH	18,100	1,334.8	1,050.8	1,249.6	1,306.4	1,320.6	1,079.2	866.2	710.0	908.8	1,079.2	1,462.6	1,831.8

(TON)

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	3,498.1	328.8	258.9	307.8	321.8	325.3	265.9	213.4	174.9	223.9	265.9	360.3	451.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	2,440.5	229.4	180.6	214.8	224.5	227.0	185.5	148.9	122.0	156.2	185.5	251.4	314.8
3.	KUTAI KERTANEGARA	4,864.7	457.3	360.0	428.1	447.6	452.4	369.7	296.7	243.2	311.3	369.7	501.1	627.6
4.	KUTAI TIMUR	2,033.8	191.2	150.5	179.0	187.1	189.1	154.6	124.1	101.7	130.2	154.6	209.5	262.4
5.	KUTAI BARAT	122.0	11.5	9.0	10.7	11.2	11.3	9.3	7.4	6.1	7.8	9.3	12.6	15.7
6.	BERAU	732.2	68.8	54.2	64.4	67.4	68.1	55.6	44.7	36.6	46.9	55.6	75.4	94.4
7.	MAHAKAM HULU	8.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
8.	SAMARINDA	650.8	61.2	48.2	57.3	59.9	60.5	49.5	39.7	32.5	41.7	49.5	67.0	84.0
9.	BALIKPAPAN	325.4	30.6	24.1	28.6	29.9	30.3	24.7	19.8	16.3	20.8	24.7	33.5	42.0
10.	BONTANG	48.8	4.6	3.6	4.3	4.5	4.5	3.7	3.0	2.4	3.1	3.7	5.0	6.3
	JUMLAH	14,724.4	1,384.1	1,089.6	1,295.7	1,354.6	1,369.4	1,119.1	898.2	736.2	942.4	1,119.1	1,516.6	1,899.4

(TON)



SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	(TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	208.1	20	15	18	19	19	16	13	10	13	16	21	27
2.	PENAJAM PASER UTARA	145.2	14	11	13	13	14	11	9	7	9	11	15	19
3.	KUTAI KERTANEGARA	289.4	27	21	25	27	27	22	18	14	19	22	30	37
4.	KUTAI TIMUR	121.0	11	9	11	11	11	9	7	6	8	9	12	16
5.	KUTAI BARAT	7.3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
6.	BERAU	43.6	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	6
7.	MAHAKAM HULU	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	SAMARINDA	38.7	4	3	3	4	4	3	2	2	2	3	4	5
9.	BALIKPAPAN	19.4	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
10.	BONTANG	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		876.0	82	65	77	81	81	67	53	44	56	67	90	113

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	(TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	488.5	45.9	36.1	43.0	44.9	45.4	37.1	29.8	24.4	31.3	37.1	50.3	63.0
2.	PENAJAM PASER UTARA	340.8	32.0	25.2	30.0	31.4	31.7	25.9	20.8	17.0	21.8	25.9	35.1	44.0
3.	KUTAI KERTANEGARA	679.3	63.9	50.3	59.8	62.5	63.2	51.6	41.4	34.0	43.5	51.6	70.0	87.6
4.	KUTAI TIMUR	284.0	26.7	21.0	25.0	26.1	26.4	21.6	17.3	14.2	18.2	21.6	29.3	36.6
5.	KUTAI BARAT	17.0	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	0.9	1.1	1.3	1.8	2.2
6.	BERAU	102.2	9.6	7.6	9.0	9.4	9.5	7.8	6.2	5.1	6.5	7.8	10.5	13.2
7.	MAHAKAM HULU	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
8.	SAMARINDA	90.9	8.5	6.7	8.0	8.4	8.5	6.9	5.5	4.5	5.8	6.9	9.4	11.7
9.	BALIKPAPAN	45.4	4.3	3.4	4.0	4.2	4.2	3.5	2.8	2.3	2.9	3.5	4.7	5.9
10.	BONTANG	6.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9
JUMLAH		2,056.2	193.3	152.2	180.9	189.2	191.2	156.3	125.4	102.8	131.6	156.3	211.8	265.2

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

															(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1.	PASER	925	87.0	68.5	81.4	85.1	86.0	70.3	56.4	46.3	59.2	70.3	95.3	119.3	
2.	PENAJAM PASER UTARA	850	79.9	62.9	74.8	78.2	79.1	64.6	51.9	42.5	54.4	64.6	87.6	109.7	
3.	KUTAI KERTANEGARA	1,359	127.7	100.6	119.6	125.0	126.4	103.3	82.9	68.0	87.0	103.3	140.0	175.3	
4.	KUTAI TIMUR	1,130	106.2	83.6	99.4	104.0	105.1	85.9	68.9	56.5	72.3	85.9	116.4	145.8	
5.	KUTAI BARAT	100	9.4	7.4	8.8	9.2	9.3	7.6	6.1	5.0	6.4	7.6	10.3	12.9	
6.	BERAU	245	23.0	18.1	21.6	22.5	22.8	18.6	14.9	12.3	15.7	18.6	25.2	31.6	
7.	MAHAKAM HULU	9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	
8.	SAMARINDA	372	35.0	27.5	32.7	34.2	34.6	28.3	22.7	18.6	23.8	28.3	38.3	48.0	
9.	BALIKPAPAN	350	32.9	25.9	30.8	32.2	32.6	26.6	21.4	17.5	22.4	26.6	36.1	45.2	
10.	BONTANG	30	2.8	2.2	2.6	2.8	2.8	2.3	1.8	1.5	1.9	2.3	3.1	3.9	
	JUMLAH	5,370	504.8	397.4	472.6	494.0	499.4	408.1	327.6	268.5	343.7	408.1	553.1	692.7	

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN														(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	691.4	65.0	51.2	60.8	63.6	64.3	52.5	42.2	34.6	44.3	52.5	71.2	89.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	635.4	59.7	47.0	55.9	58.5	59.1	48.3	38.8	31.8	40.7	48.3	65.4	82.0
3.	KUTAI KERTANEGARA	1,015.9	95.5	75.2	89.4	93.5	94.5	77.2	62.0	50.8	65.0	77.2	104.6	131.0
4.	KUTAI TIMUR	844.7	79.4	62.5	74.3	77.7	78.6	64.2	51.5	42.2	54.1	64.2	87.0	109.0
5.	KUTAI BARAT	74.8	7.0	5.5	6.6	6.9	7.0	5.7	4.6	3.7	4.8	5.7	7.7	9.6
6.	BERAU	183.1	17.2	13.6	16.1	16.8	17.0	13.9	11.2	9.2	11.7	13.9	18.9	23.6
7.	MAHAKAM HULU	6.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9
8.	SAMARINDA	278.1	26.1	20.6	24.5	25.6	25.9	21.1	17.0	13.9	17.8	21.1	28.6	35.9
9.	BALIKPAPAN	261.6	24.6	19.4	23.0	24.1	24.3	19.9	16.0	13.1	16.7	19.9	26.9	33.7
10.	BONTANG	22.4	2.1	1.7	2.0	2.1	2.1	1.7	1.4	1.1	1.4	1.7	2.3	2.9
	JUMLAH	4,014.1	377.3	297.0	353.2	369.3	373.3	305.1	244.9	200.7	256.9	305.1	413.4	517.8

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	55.5	5.2	4.1	4.9	5.1	5.2	4.2	3.4	2.8	3.6	4.2	5.7	7.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	51.0	4.8	3.8	4.5	4.7	4.7	3.9	3.1	2.6	3.3	3.9	5.3	6.6
3.	KUTAI KERTANEGARA	81.5	7.7	6.0	7.2	7.5	7.6	6.2	5.0	4.1	5.2	6.2	8.4	10.5
4.	KUTAI TIMUR	67.8	6.4	5.0	6.0	6.2	6.3	5.2	4.1	3.4	4.3	5.2	7.0	8.7
5.	KUTAI BARAT	6.0	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
6.	BERAU	14.7	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.7	0.9	1.1	1.5	1.9
7.	MAHAKAM HULU	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
8.	SAMARINDA	22.3	2.1	1.7	2.0	2.1	2.1	1.7	1.4	1.1	1.4	1.7	2.3	2.9
9.	BALIKPAPAN	21.0	2.0	1.6	1.8	1.9	2.0	1.6	1.3	1.1	1.3	1.6	2.2	2.7
10.	BONTANG	1.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	JUMLAH	322.2	30.3	23.8	28.4	29.6	30.0	24.5	19.7	16.1	20.6	24.5	33.2	41.6

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	155.3	14.6	11.5	13.7	14.3	14.4	11.8	9.5	7.8	9.9	11.8	16.0	20.0
2.	PENAJAM PASER UTARA	142.7	13.4	10.6	12.6	13.1	13.3	10.8	8.7	7.1	9.1	10.8	14.7	18.4
3.	KUTAI KERTANEGARA	228.2	21.4	16.9	20.1	21.0	21.2	17.3	13.9	11.4	14.6	17.3	23.5	29.4
4.	KUTAI TIMUR	189.7	17.8	14.0	16.7	17.5	17.6	14.4	11.6	9.5	12.1	14.4	19.5	24.5
5.	KUTAI BARAT	16.8	1.6	1.2	1.5	1.5	1.6	1.3	1.0	0.8	1.1	1.3	1.7	2.2
6.	BERAU	41.1	3.9	3.0	3.6	3.8	3.8	3.1	2.5	2.1	2.6	3.1	4.2	5.3
7.	MAHAKAM HULU	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
8.	SAMARINDA	62.5	5.9	4.6	5.5	5.7	5.8	4.7	3.8	3.1	4.0	4.7	6.4	8.1
9.	BALIKPAPAN	58.8	5.5	4.3	5.2	5.4	5.5	4.5	3.6	2.9	3.8	4.5	6.1	7.6
10.	BONTANG	5.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
	JUMLAH	901.6	84.8	66.7	79.3	82.9	83.9	68.5	55.0	45.1	57.7	68.5	92.9	116.3

SUB SEKTOR : PETERNAKAN

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	5.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7
2.	PENAJAM PASER UTARA	5.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
3.	KUTAI KERTANEGARA	8.2	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1
4.	KUTAI TIMUR	6.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9
5.	KUTAI BARAT	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
6.	BERAU	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
7.	MAHAKAM HULU	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	SAMARINDA	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
9.	BALIKPAPAN	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
10.	BONTANG	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JUMLAH	32.2	3.0	2.4	2.8	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	2.1	2.4	3.3	4.2

SUB SEKTOR : PERIKANAN

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	17.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	0.9	1.1	1.3	1.8	2.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	15.8	1.5	1.2	1.4	1.5	1.5	1.2	1.0	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
3.	KUTAI KERTANEGARA	25.3	2.4	1.9	2.2	2.3	2.4	1.9	1.5	1.3	1.6	1.9	2.6	3.3
4.	KUTAI TIMUR	21.0	2.0	1.6	1.8	1.9	2.0	1.6	1.3	1.1	1.3	1.6	2.2	2.7
5.	KUTAI BARAT	1.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
6.	BERAU	4.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
7.	MAHAKAM HULU	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	SAMARINDA	6.9	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9
9.	BALIKPAPAN	6.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8
10.	BONTANG	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	JUMLAH	99.9	9.4	7.4	8.8	9.2	9.3	7.6	6.1	5.0	6.4	7.6	10.3	12.9

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

															(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1.	PASER	800	75.2	59.2	70.4	73.6	74.4	60.8	48.8	40.0	51.2	60.8	82.4	103.2	
2.	PENAJAM PASER UTARA	400	37.6	29.6	35.2	36.8	37.2	30.4	24.4	20.0	25.6	30.4	41.2	51.6	
3.	KUTAI KERTANEGARA	400	37.6	29.6	35.2	36.8	37.2	30.4	24.4	20.0	25.6	30.4	41.2	51.6	
4.	KUTAI TIMUR	430	40.4	31.8	37.8	39.6	40.0	32.7	26.2	21.5	27.5	32.7	44.3	55.5	
5.	KUTAI BARAT	50	4.7	3.7	4.4	4.6	4.7	3.8	3.1	2.5	3.2	3.8	5.2	6.5	
6.	BERAU	250	23.5	18.5	22.0	23.0	23.3	19.0	15.3	12.5	16.0	19.0	25.8	32.3	
7.	MAHAKAM HULU	5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	
8.	SAMARINDA	150	14.1	11.1	13.2	13.8	14.0	11.4	9.2	7.5	9.6	11.4	15.5	19.4	
9.	BALIKPAPAN	150	14.1	11.1	13.2	13.8	14.0	11.4	9.2	7.5	9.6	11.4	15.5	19.4	
10.	BONTANG	15	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.5	1.9	
	JUMLAH	2,650	249.1	196.1	233.2	243.8	246.5	201.4	161.7	132.5	169.6	201.4	273.0	341.9	

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN														(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	619.0	58.2	45.8	54.5	56.9	57.6	47.0	37.8	30.9	39.6	47.0	63.8	79.8
2.	PENAJAM PASER UTARA	309.5	29.1	22.9	27.2	28.5	28.8	23.5	18.9	15.5	19.8	23.5	31.9	39.9
3.	KUTAI KERTANEGARA	309.5	29.1	22.9	27.2	28.5	28.8	23.5	18.9	15.5	19.8	23.5	31.9	39.9
4.	KUTAI TIMUR	332.7	31.3	24.6	29.3	30.6	30.9	25.3	20.3	16.6	21.3	25.3	34.3	42.9
5.	KUTAI BARAT	38.7	3.6	2.9	3.4	3.6	3.6	2.9	2.4	1.9	2.5	2.9	4.0	5.0
6.	BERAU	193.4	18.2	14.3	17.0	17.8	18.0	14.7	11.8	9.7	12.4	14.7	19.9	25.0
7.	MAHAKAM HULU	3.9	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
8.	SAMARINDA	116.1	10.9	8.6	10.2	10.7	10.8	8.8	7.1	5.8	7.4	8.8	12.0	15.0
9.	BALIKPAPAN	116.1	10.9	8.6	10.2	10.7	10.8	8.8	7.1	5.8	7.4	8.8	12.0	15.0
10.	BONTANG	11.6	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5
JUMLAH		2,050.3	192.7	151.7	180.4	188.6	190.7	155.8	125.1	102.5	131.2	155.8	211.2	264.5

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	37.6	3.5	2.8	3.3	3.5	3.5	2.9	2.3	1.9	2.4	2.9	3.9	4.9
2.	PENAJAM PASER UTARA	18.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.4
3.	KUTAI KERTANEGARA	18.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.4
4.	KUTAI TIMUR	20.2	1.9	1.5	1.8	1.9	1.9	1.5	1.2	1.0	1.3	1.5	2.1	2.6
5.	KUTAI BARAT	2.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
6.	BERAU	11.8	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5
7.	MAHAKAM HULU	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	SAMARINDA	7.1	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9
9.	BALIKPAPAN	7.1	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9
10.	BONTANG	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	JUMLAH	124.6	11.7	9.2	11.0	11.5	11.6	9.5	7.6	6.2	8.0	9.5	12.8	16.1

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	133.3	12.5	9.9	11.7	12.3	12.4	10.1	8.1	6.7	8.5	10.1	13.7	17.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	66.6	6.3	4.9	5.9	6.1	6.2	5.1	4.1	3.3	4.3	5.1	6.9	8.6
3.	KUTAI KERTANEGARA	66.6	6.3	4.9	5.9	6.1	6.2	5.1	4.1	3.3	4.3	5.1	6.9	8.6
4.	KUTAI TIMUR	71.6	6.7	5.3	6.3	6.6	6.7	5.4	4.4	3.6	4.6	5.4	7.4	9.2
5.	KUTAI BARAT	8.3	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	1.1
6.	BERAU	41.7	3.9	3.1	3.7	3.8	3.9	3.2	2.5	2.1	2.7	3.2	4.3	5.4
7.	MAHAKAM HULU	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
8.	SAMARINDA	25.0	2.3	1.8	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.2	1.6	1.9	2.6	3.2
9.	BALIKPAPAN	25.0	2.3	1.8	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.2	1.6	1.9	2.6	3.2
10.	BONTANG	2.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	JUMLAH	441.5	41.5	32.7	38.9	40.6	41.1	33.6	26.9	22.1	28.3	33.6	45.5	57.0

## (TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	9.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2
2.	PENAJAM PASER UTARA	4.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
3.	KUTAI KERTANEGARA	4.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
4.	KUTAI TIMUR	4.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
5.	KUTAI BARAT	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
6.	BERAU	2.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
7.	MAHAKAM HULU	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	SAMARINDA	1.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
9.	BALIKPAPAN	1.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
10.	BONTANG	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.	JUMLAH	29.9	2.8	2.2	2.6	2.8	2.8	2.3	1.8	1.5	1.9	2.3	3.1	3.9

## (TON)

[illegible]

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN													(TON)	
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES		
1.	PASER	9,000	846.0	666.0	792.0	828.0	837.0	684.0	549.0	450.0	576.0	684.0	927.0	1,161.0		
2.	PENAJAM PASER UTARA	4,500	423.0	333.0	396.0	414.0	418.5	342.0	274.5	225.0	288.0	342.0	463.5	580.5		
3.	KUTAI KERTANEGARA	7,500	705.0	555.0	660.0	690.0	697.5	570.0	457.5	375.0	480.0	570.0	772.5	967.5		
4.	KUTAI TIMUR	5,500	517.0	407.0	484.0	506.0	511.5	418.0	335.5	275.0	352.0	418.0	566.5	709.5		
5.	KUTAI BARAT	600	56.4	44.4	52.8	55.2	55.8	45.6	36.6	30.0	38.4	45.6	61.8	77.4		
6.	BERAU	2,600	244.4	192.4	228.8	239.2	241.8	197.6	158.6	130.0	166.4	197.6	267.8	335.4		
7.	MAHAKAM HULU	15	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.5	1.9		
8.	SAMARINDA	1,500	141.0	111.0	132.0	138.0	139.5	114.0	91.5	75.0	96.0	114.0	154.5	193.5		
9.	BALIKPAPAN	1,000	94.0	74.0	88.0	92.0	93.0	76.0	61.0	50.0	64.0	76.0	103.0	129.0		
10.	BONTANG	65	6.1	4.8	5.7	6.0	6.0	4.9	4.0	3.3	4.2	4.9	6.7	8.4		
	JUMLAH	32,280	3,034.3	2,388.7	2,840.6	2,969.8	3,002.0	2,453.3	1,969.1	1,614.0	2,065.9	2,453.3	3,324.8	4,164.1		

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN													(TON)	
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES		
1.	PASER	7,124.4	669.7	527.2	626.9	655.4	662.6	541.5	434.6	356.2	456.0	541.5	733.8	919.0		
2.	PENAJAM PASER UTARA	3,562.2	334.8	263.6	313.5	327.7	331.3	270.7	217.3	178.1	228.0	270.7	366.9	459.5		
3.	KUTAI KERTANEGARA	5,937.0	558.1	439.3	522.5	546.2	552.1	451.2	362.2	296.9	380.0	451.2	611.5	765.9		
4.	KUTAI TIMUR	4,353.8	409.3	322.2	383.1	400.5	404.9	330.9	265.6	217.7	278.6	330.9	448.4	561.6		
5.	KUTAI BARAT	475.0	44.6	35.1	41.8	43.7	44.2	36.1	29.0	23.7	30.4	36.1	48.9	61.3		
6.	BERAU	2,058.2	193.5	152.3	181.1	189.4	191.4	156.4	125.5	102.9	131.7	156.4	212.0	265.5		
7.	MAHAKAM HULU	11.9	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5		
8.	SAMARINDA	1,187.4	111.6	87.9	104.5	109.2	110.4	90.2	72.4	59.4	76.0	90.2	122.3	153.2		
9.	BALIKPAPAN	791.6	74.4	58.6	69.7	72.8	73.6	60.2	48.3	39.6	50.7	60.2	81.5	102.1		
10.	BONTANG	51.5	4.8	3.8	4.5	4.7	4.8	3.9	3.1	2.6	3.3	3.9	5.3	6.6		
	JUMLAH	25,552.8	2,402.0	1,890.9	2,248.7	2,350.9	2,376.4	1,942.0	1,558.7	1,277.6	1,635.4	1,942.0	2,631.9	3,296.3		



SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	432.9	40.7	32.0	38.1	39.8	40.3	32.9	26.4	21.6	27.7	32.9	44.6	55.8
2.	PENAJAM PASER UTARA	216.5	20.3	16.0	19.0	19.9	20.1	16.5	13.2	10.8	13.9	16.5	22.3	27.9
3.	KUTAI KERTANEGARA	360.8	33.9	26.7	31.7	33.2	33.5	27.4	22.0	18.0	23.1	27.4	37.2	46.5
4.	KUTAI TIMUR	264.6	24.9	19.6	23.3	24.3	24.6	20.1	16.1	13.2	16.9	20.1	27.2	34.1
5.	KUTAI BARAT	28.9	2.7	2.1	2.5	2.7	2.7	2.2	1.8	1.4	1.8	2.2	3.0	3.7
6.	BERAU	125.1	11.8	9.3	11.0	11.5	11.6	9.5	7.6	6.3	8.0	9.5	12.9	16.1
7.	MAHAKAM HULU	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
8.	SAMARINDA	72.2	6.8	5.3	6.3	6.6	6.7	5.5	4.4	3.6	4.6	5.5	7.4	9.3
9.	BALIKPAPAN	48.1	4.5	3.6	4.2	4.4	4.5	3.7	2.9	2.4	3.1	3.7	5.0	6.2
10.	BONTANG	3.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
	JUMLAH	1,552.7	146.0	114.9	136.6	142.8	144.4	118.0	94.7	77.6	99.4	118.0	159.9	200.3

(TON)

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	1,354.5	127.3	100.2	119.2	124.6	126.0	102.9	82.6	67.7	86.7	102.9	139.5	174.7
2.	PENAJAM PASER UTARA	677.3	63.7	50.1	59.6	62.3	63.0	51.5	41.3	33.9	43.3	51.5	69.8	87.4
3.	KUTAI KERTANEGARA	1,128.8	106.1	83.5	99.3	103.8	105.0	85.8	68.9	56.4	72.2	85.8	116.3	145.6
4.	KUTAI TIMUR	827.8	77.8	61.3	72.8	76.2	77.0	62.9	50.5	41.4	53.0	62.9	85.3	106.8
5.	KUTAI BARAT	90.3	8.5	6.7	7.9	8.3	8.4	6.9	5.5	4.5	5.8	6.9	9.3	11.6
6.	BERAU	391.3	36.8	29.0	34.4	36.0	36.4	29.7	23.9	19.6	25.0	29.7	40.3	50.5
7.	MAHAKAM HULU	2.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
8.	SAMARINDA	225.8	21.2	16.7	19.9	20.8	21.0	17.2	13.8	11.3	14.4	17.2	23.3	29.1
9.	BALIKPAPAN	150.5	14.1	11.1	13.2	13.8	14.0	11.4	9.2	7.5	9.6	11.4	15.5	19.4
10.	BONTANG	9.8	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3
	JUMLAH	4,858.1	456.7	359.5	427.5	446.9	451.8	369.2	296.3	242.9	310.9	369.2	500.4	626.7

(TON)

SUB SEKTOR : PETERNAKAN

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	64.8	6.1	4.8	5.7	6.0	6.0	4.9	4.0	3.2	4.1	4.9	6.7	8.4
2.	PENAJAM PASER UTARA	32.4	3.0	2.4	2.9	3.0	3.0	2.5	2.0	1.6	2.1	2.5	3.3	4.2
3.	KUTAI KERTANEGARA	54.0	5.1	4.0	4.8	5.0	5.0	4.1	3.3	2.7	3.5	4.1	5.6	7.0
4.	KUTAI TIMUR	39.6	3.7	2.9	3.5	3.6	3.7	3.0	2.4	2.0	2.5	3.0	4.1	5.1
5.	KUTAI BARAT	4.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
6.	BERAU	18.7	1.8	1.4	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.4
7.	MAHAKAM HULU	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	SAMARINDA	10.8	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4
9.	BALIKPAPAN	7.2	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9
10.	BONTANG	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	JUMLAH	232.4	21.8	17.2	20.5	21.4	21.6	17.7	14.2	11.6	14.9	17.7	23.9	30.0

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	23.4	2.20	1.73	2.06	2.15	2.18	1.78	1.43	1.17	1.50	1.78	2.41	3.02
2.	PENAJAM PASER UTARA	11.7	1.10	0.87	1.03	1.08	1.09	0.89	0.71	0.59	0.75	0.89	1.21	1.51
3.	KUTAI KERTANEGARA	19.5	1.83	1.44	1.72	1.79	1.81	1.48	1.19	0.98	1.25	1.48	2.01	2.52
4.	KUTAI TIMUR	14.3	1.34	1.06	1.26	1.32	1.33	1.09	0.87	0.72	0.92	1.09	1.47	1.84
5.	KUTAI BARAT	1.6	0.15	0.12	0.14	0.14	0.15	0.12	0.10	0.08	0.10	0.12	0.16	0.20
6.	BERAU	6.8	0.64	0.50	0.59	0.62	0.63	0.51	0.41	0.34	0.43	0.51	0.70	0.87
7.	MAHAKAM HULU	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
8.	SAMARINDA	3.9	0.37	0.29	0.34	0.36	0.36	0.30	0.24	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
9.	BALIKPAPAN	2.6	0.24	0.19	0.23	0.24	0.24	0.20	0.16	0.13	0.17	0.20	0.27	0.34
10.	BONTANG	0.2	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
	JUMLAH	83.9	7.89	6.21	7.39	7.72	7.81	6.38	5.12	4.20	5.37	6.38	8.64	10.83

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)														
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	500	47.0	37.0	44.0	46.0	46.5	38.0	30.5	25.0	32.0	38.0	51.5	64.5
2.	PENAJAM PASER UTARA	300	28.2	22.2	26.4	27.6	27.9	22.8	18.3	15.0	19.2	22.8	30.9	38.7
3.	KUTAI KERTANEGARA	525	49.4	38.9	46.2	48.3	48.8	39.9	32.0	26.3	33.6	39.9	54.1	67.7
4.	KUTAI TIMUR	70	6.6	5.2	6.2	6.4	6.5	5.3	4.3	3.5	4.5	5.3	7.2	9.0
5.	KUTAI BARAT	25	2.4	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.3	1.6	1.9	2.6	3.2
6.	BERAU	60	5.6	4.4	5.3	5.5	5.6	4.6	3.7	3.0	3.8	4.6	6.2	7.7
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SAMARINDA	400	37.6	29.6	35.2	36.8	37.2	30.4	24.4	20.0	25.6	30.4	41.2	51.6
9.	BALIKPAPAN	220	20.7	16.3	19.4	20.2	20.5	16.7	13.4	11.0	14.1	16.7	22.7	28.4
10.	BONTANG	30	2.8	2.2	2.6	2.8	2.8	2.3	1.8	1.5	1.9	2.3	3.1	3.9
	JUMLAH	2,130	200.2	157.6	187.4	196.0	198.1	161.9	129.9	106.5	136.3	161.9	219.4	274.8

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN															(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1.	PASER	409	38.4	30.2	36.0	37.6	38.0	31.1	24.9	20.4	26.2	31.1	42.1	52.7	
2.	PENAJAM PASER UTARA	245.2	23.0	18.1	21.6	22.6	22.8	18.6	15.0	12.3	15.7	18.6	25.3	31.6	
3.	KUTAI KERTANEGARA	429.0	40.3	31.7	37.8	39.5	39.9	32.6	26.2	21.5	27.5	32.6	44.2	55.3	
4.	KUTAI TIMUR	57.2	5.4	4.2	5.0	5.3	5.3	4.3	3.5	2.9	3.7	4.3	5.9	7.4	
5.	KUTAI BARAT	20.4	1.9	1.5	1.8	1.9	1.9	1.6	1.2	1.0	1.3	1.6	2.1	2.6	
6.	BERAU	49.0	4.6	3.6	4.3	4.5	4.6	3.7	3.0	2.5	3.1	3.7	5.1	6.3	
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	SAMARINDA	326.9	30.7	24.2	28.8	30.1	30.4	24.8	19.9	16.3	20.9	24.8	33.7	42.2	
9.	BALIKPAPAN	179.8	16.9	13.3	15.8	16.5	16.7	13.7	11.0	9.0	11.5	13.7	18.5	23.2	
10.	BONTANG	24.5	2.3	1.8	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.2	1.6	1.9	2.5	3.2	
	JUMLAH	1,740.6	163.6	128.8	153.2	160.1	161.9	132.3	106.2	87.0	111.4	132.3	179.3	224.5	

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	44.2	4.2	3.3	3.9	4.1	4.1	3.4	2.7	2.2	2.8	3.4	4.6	5.7
2.	PENAJAM PASER UTARA	26.5	2.5	2.0	2.3	2.4	2.5	2.0	1.6	1.3	1.7	2.0	2.7	3.4
3.	KUTAI KERTANEGARA	46.4	4.4	3.4	4.1	4.3	4.3	3.5	2.8	2.3	3.0	3.5	4.8	6.0
4.	KUTAI TIMUR	6.2	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
5.	KUTAI BARAT	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
6.	BERAU	5.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SAMARINDA	35.4	3.3	2.6	3.1	3.3	3.3	2.7	2.2	1.8	2.3	2.7	3.6	4.6
9.	BALIKPAPAN	19.4	1.8	1.4	1.7	1.8	1.8	1.5	1.2	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5
10.	BONTANG	2.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	JUMLAH	188.3	17.7	13.9	16.6	17.3	17.5	14.3	11.5	9.4	12.1	14.3	19.4	24.3

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

(TON)

NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	41.8	3.9	3.1	3.7	3.8	3.9	3.2	2.5	2.1	2.7	3.2	4.3	5.4
2.	PENAJAM PASER UTARA	25.1	2.4	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.5	1.3	1.6	1.9	2.6	3.2
3.	KUTAI KERTANEGARA	43.9	4.1	3.2	3.9	4.0	4.1	3.3	2.7	2.2	2.8	3.3	4.5	5.7
4.	KUTAI TIMUR	5.9	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8
5.	KUTAI BARAT	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
6.	BERAU	5.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SAMARINDA	33.4	3.1	2.5	2.9	3.1	3.1	2.5	2.0	1.7	2.1	2.5	3.4	4.3
9.	BALIKPAPAN	18.4	1.7	1.4	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.4
10.	BONTANG	2.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	JUMLAH	178.1	16.7	13.2	15.7	16.4	16.6	13.5	10.9	8.9	11.4	13.5	18.3	23.0

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : PETERNAKAN														(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.	PENAJAM PASER UTARA	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
3.	KUTAI KERTANEGARA	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
4.	KUTAI TIMUR	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	KUTAI BARAT	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	BERAU	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SAMARINDA	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
9.	BALIKPAPAN	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
10.	BONTANG	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH		4.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

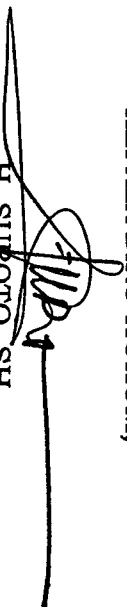
KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : PERIKANAN														(TON)
NO.	KABUPATEN/KOTA	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	PASER	4.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
2.	PENAJAM PASER UTARA	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
3.	KUTAI KERTANEGARA	4.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
4.	KUTAI TIMUR	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
5.	KUTAI BARAT	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	BERAU	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
7.	MAHAKAM HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	SAMARINDA	3.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
9.	BALIKPAPAN	1.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
10.	BONTANG	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JUMLAH	18.1	1.7	1.3	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.4	1.9	2.3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 15 Desember 2015  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

  
H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK